

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN OLEH BADAN USAHA (STUDI KASUS DI KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG SINGARAJA)

Oleh

Andres Avelino Johan Simatupang, NIM 2214101083

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh badan usaha dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Sebagai instrumen krusial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kepatuhan badan usaha menjadi syarat mutlak keberlanjutan perlindungan kesehatan pekerja. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakpatuhan yang merugikan hak konstitusional tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara mendalam dengan pihak internal BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi badan usaha di Kabupaten Buleleng meliputi keterlambatan pembayaran iuran, penunggakan total, serta praktik tidak mendaftarkan seluruh tenaga kerja (pendaftaran parsial). Faktor penyebab utama mencakup kendala finansial perusahaan dan rendahnya kesadaran hukum pemberi kerja. Upaya penyelesaian dilakukan melalui dua jalur: preventif dan represif. Jalur preventif mencakup sosialisasi dan pembinaan, sementara jalur represif administratif dilakukan melalui penerbitan surat teguran dan pengenaan denda. Lebih lanjut, BPJS Kesehatan melakukan sinergi strategis dengan Kejaksaan Negeri Buleleng melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penagihan iuran serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembatasan pelayanan publik tertentu (TMPP). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum telah dioptimalkan, efektivitas penegakan kepatuhan masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya efek jera sanksi administratif.

Kata Kunci: Wanprestasi, BPJS Kesehatan, Badan Usaha, Perlindungan Hukum.

***EFFORTS TO RESOLVE DEFAULTS ON BPJS HEALTH
CONTRIBUTION PAYMENTS BY BUSINESS ENTITIES
(A CASE STUDY AT THE BPJS HEALTH SINGARAJA BRANCH
OFFICE)***

By

Andres Avelino Johan Simatupang, NIM 2214101083

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of non-compliance committed by business entities in paying BPJS Kesehatan premiums and to examine the resolution efforts undertaken by the BPJS Kesehatan Singaraja Branch Office. As a crucial component of the National Social Security System (SJSN), business compliance is an absolute prerequisite for the sustainability of workers' health protection. However, in practice, non-compliance that infringes upon workers' constitutional rights still occurs. The research method employed is empirical legal research using a case study approach. Data were collected through observation, document analysis, and in-depth interviews with internal staff at the BPJS Kesehatan Singaraja Branch. The research findings indicate that forms of non-compliance by businesses in Buleleng Regency include late payment of premiums, total arrears, and the practice of failing to register all workers (partial registration). The primary contributing factors include companies' financial constraints and employers' low legal awareness. Resolution efforts are carried out through two channels: preventive and repressive. The preventive channel involves outreach and guidance, while the administrative enforcement channel is carried out through the issuance of warning letters and the imposition of fines. Furthermore, BPJS Kesehatan engages in strategic collaboration with the Buleleng District Attorney's Office via the Special Power of Attorney (SKK) mechanism for premium collection, as well as coordination with local governments regarding restrictions on certain public services (TMPP). This study concludes that although various legal instruments have been optimized, the effectiveness of compliance enforcement is still hampered by weak inter-agency coordination and the lack of a deterrent effect of administrative sanctions.

Keywords: *Default, BPJS Kesehatan, Business Entities, Legal Protection.*